



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## DMO DI TENGAH KENAIKAN HARGA BATUBARA

**Niken Paramita Purwanto**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Keamanan pasokan batubara di dalam negeri masih dibayangi ketidakpastian meskipun pemerintah secara tegas telah mengatur tentang wajib pasok domestik atau *domestic market obligation* (DMO). Permasalahannya, harga batubara global (*Newcastle*) belakangan ini kembali menembus rekor tertinggi, yaitu USD457,8 per ton. Harga tersebut naik dari rekor sebelumnya sebesar USD440 per ton pada Maret 2022. Sementara itu, pemerintah telah mengatur harga batubara dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021, yang menetapkan harga maksimal batubara DMO sebesar USD70-USD90 per ton untuk pembangkit listrik serta sumber daya beberapa industri lain seperti semen.

Berdasarkan data *Minerba One Data Indonesia*, realisasi produksi batubara hingga 8 September 2022 sebanyak 444,28 juta ton. Dari jumlah tersebut, diketahui realisasi ekspor mencapai 170,61 juta ton, realisasi DMO mencapai 54,03 juta ton, dan pasokan untuk domestik sebanyak 124,46 juta ton. Dari data tersebut juga diketahui realisasi DMO batubara sejak Mei 2022 hingga September 2022 masih 0. Adapun pada Januari 2022 realisasi DMO sebanyak 14,03 juta ton, Februari 2022 sebanyak 16,6 juta ton, Maret 2022 sebanyak 12,37 juta ton, dan April 2022 sebanyak 11,03 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengingatkan bahwa pelaku usaha pertambangan batubara harus sudah menumpuk stok batubara menjelang cuaca ekstrem akhir tahun ini. Hal itu dilakukan agar kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero)/PLN tetap bisa dipenuhi. Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin ekspor batubara kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO hingga akhir tahun ini. Kebutuhan batubara PLN pada tahun 2022 ini sendiri diproyeksi naik menjadi 84,7 juta ton dari sebelumnya 66,4 juta ton.

Pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN di Indonesia seringkali menjadi masalah, khususnya di tengah tingginya harga komoditas tersebut di pasar global. PLN melaporkan bahwa batubara penugasan dari pemasok belakangan makin terbatas di tengah harga batubara yang terus bertahan pada level tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan *pertama*, kewajiban pemenuhan DMO ditetapkan sebesar 25% dari total penjualan selama satu tahun ke depan. Namun, tidak ada peraturan yang menekankan kapan pelaku usaha pertambangan batubara harus memenuhi DMO tersebut. *Kedua*, banyak pelaku usaha pertambangan batubara yang menyatakan tidak bisa memenuhi spesifikasi batubara yang dibutuhkan oleh PLN. Saat ini batubara yang umum digunakan pada PLTU PLN memiliki kalori di bawah 4.500 GAR. *Ketiga*, tarif denda dan kompensasi yang rendah mendorong pelaku usaha pertambangan batubara memilih membayar denda atau kompensasi dibandingkan berusaha memenuhi kewajiban DMO mereka.

Pemerintah perlu segera mengatasi permasalahan terkait DMO sehingga kebutuhan batubara di dalam negeri khususnya pasokan untuk pembangkit listrik PLN dapat terpenuhi. Keamanan

pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri harus terjamin. Oleh karena itu, perlu ada dorongan yang lebih kuat dari pemerintah agar para pelaku usaha pertambangan batubara memenuhi kewajiban DMO mereka sebesar 25% terlebih dahulu sebelum mengekspor atau menjualnya ke luar negeri.

## Atensi DPR

Kenaikan harga batubara di pasar global belakangan ini yang cukup signifikan menyebabkan para pelaku usaha pertambangan batubara lebih mengutamakan menjual hasil produksinya keluar negeri daripada memenuhi kewajiban DMO-nya terlebih dahulu. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri, karena terkait dengan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan terkait DMO sehingga kebutuhan batubara di dalam negeri khususnya pasokan untuk pembangkit listrik PLN dapat terpenuhi. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk terus melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai solusi atas permasalahan di sektor energi saat ini.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 9 September 2022; dan  
*Kontan*, 12 September 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



 @puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Riyadi Santoso  
Sri Nurhayati Q.  
Dian Cahyaningrum  
Venti Eka Satya  
Nidya Waras Sayekti

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022